



(Pand) Economics: Refleksi atas Sistem Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19

Surya Desismansyah Eka Putra

surya.putra.fis@gmail.ac.id

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang

Abstrak

Pandemi *Covid-19* telah mengubah banyak kebiasaan manusia, termasuk ekonomi. Aktivitas ekonomi yang biasanya masif berjalan berubah melambat karena alur pada sistem ekonominya terhambat. *Covid-19* secara sistemik telah membuka tabir sirkulasi ekonomi di Indonesia yang timpang antara pusat dan daerah. Ketimpangan ini timbul akibat model ekonomi Keynesian yang menjadi dasar pengambilan kebijakan ekonomi, bahkan di masa pandemi. Akibatnya, depresi ekonomi menjadi tak terelakkan dan defisit anggaran pun terjadi. Problem yang dibahas dalam tulisan akan ditelaah melalui dua sudut pandang yaitu ideologi ekonomi dan Pancasila. Ideologi ekonomi dipakai untuk menyingkap metakonsepsi apa yang menjadi dasar penyelenggaraan perekonomian di Indonesia, sedangkan Pancasila digunakan sebagai kaca mata refleksi penting tentang usaha untuk mencapai cita-cita ekonomi yang semestinya. Dua sudut pandang ini nantinya akan memberi gambaran dan refleksi terhadap kondisi ekonomi pada saat pandemi Covid-19 seperti sekarang, yang penulis sebut dengan *pandeconomics*. Metode yang dipakai dalam penulisan artikel ini adalah studi kepustakaan dan verifikasi media. Hasilnya, (a) sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia saat ini adalah sistem ekonomi kapitalisme perifer dengan jiwa Keynesian, dan (b) redefinisi konsep ekonomi ala Indonesia melalui sistem koperasi Hatta dan *trisakti* Soekarno ternyata telah secara implementatif dilakukan di Kabupaten Trenggalek Jawa Timur.

Kata Kunci: Pandemi, Ekonomi, *Pandeconomics*

Abstract

The Covid-19 pandemic has changed many human habits, including the economy. Economic activity that is usually massive is slowing down because of the flow in the economic system is hampered. Covid-19 has systemically opened the veil of economic circulation in Indonesia which is lame between the center and the regions. This imbalance arises due to the Keynesian economic model which is the basis of economic policymaking, even during the pandemic. As a result, economic depression became inevitable and budget deficits ensued. The problems discussed in the paper will be explored through two points of view, namely economic ideology and Pancasila. Economic ideology is used to uncover the meta concepts that are the basis of the administration of the economy in Indonesia, while the Pancasila is used as an important reflection lens on efforts to achieve economic goals that should be. These two perspectives will later give an overview and reflection on the economic conditions during the Covid-19 pandemic as it is now, which it calls "pandeconomics". The method used in this article is literature study and media

verification. As the result, (a) the current economic system in Indonesia is the economic system of peripheral capitalism with a Keynesian spirit, and (b) the redefinition of the Indonesian-style economic concept through the "koperasi"s Hatta and Trisakti Soekarno system has actually been implemented in the Trenggalek Regency in East Java.

Keywords: *Pandemic, Economic, Pandeconomics*

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang menyebar ke berbagai belahan dunia telah berhasil merehatkan beragam aktivitas manusia. Gerak sosial yang biasanya masif terpaksa ditunda dan dibatasi melalui serangkaian pembatasan di semua sektor, termasuk ekonomi. Tetapi aktivitas ekonomi tak mungkin dihentikan secara sempurna, sebab pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa adalah algoritma alamiah yang mendukung kelangsungan hidup manusia. Terlebih manusia yang hidup di zaman ultra teknologi yang serba canggih seperti saat ini telah mewujudkan sirkulasi perekonomian yang tak mungkin dimatikan sepenuhnya. Teknologi telah memberi fasilitas terbaik bagi kegiatan ekonomi untuk tetap berjalan dalam berbagai kondisi, meskipun aktivitas ekonomi itu sendiri tidaklah selalu rasional.

Ekonomi dibaca sebagai serangkaian kerja manusia yang dimulai dari produksi, distribusi hingga konsumsi. Di tengah kondisi pandemi, laju ekonomi yang kencang berubah melambat karena rangkaian kerja ekonomi tadi (produksi, distribusi, dan konsumsi) sedang terganggu. Gangguan ini terjadi akibat adanya depedensi atau ketergantungan yang luar biasa antar sub-sub kerja yang terlalu mengikat. Selain itu, model

produksi yang umum dipakai oleh pelaku ekonomi tidak memungkinkan terciptanya iklim dan sirkulasi ekonomi secara mandiri, karena sistem pembagian kerja yang terlalu detail.

Sejak perusahaan mobil Ford merevisi cara kerja produksi, "semua perilaku kerja manusia menjadi terkon-disi dengan tugas kerja masing-masing yang saling berkelindan satu sama lain, agar produksi yang dihasilkan masif dan efisien. Model ini umum disebut dengan istilah fordisme" (Galbraith, 1983:13). Dampak dari sistem pembagian kerja spesifik ini sangat sistemik, sebab tak satupun sub kerja yang berada di dalam satu rangkaian sistem mampu berdikari. Hasil kerja produksinya memang meningkat karena efisiensi waktu dan jenis pekerjaannya. Akan tetapi, model ini tak mengizinkan terjadinya kesalahan atau penundaan kerja. Karena capaian hasil produksi sangat bergantung dari bagaimana rangkaian kerja ini dapat berjalan dengan lancar. Atau dengan kata lain, ada depedensi luar biasa besar antara sub kerja satu dengan lainnya dalam menghasilkan barang produksi yang bagus. Problemanya adalah jika kondisi krisis seperti pandemi *Covid-19* ini terjadi dan mengganggu salah satu sub kerja tadi, apa dampaknya? Jawabannya adalah gerak ekonomi pasti terganggu, karena bidang produksi gagal

menghasilkan barang yang secara otomatis memengaruhi distribusi hingga aktivitas konsumsi. Bahkan keadaan krisis sangat mungkin terjadi.

Sistem depedensi ekonomi ini menciptakan relasi ekonomi kompleks yang kuat sekaligus rentan. Kuat, karena relasi kebutuhan antar unit kerja menjadi tak terpisahkan. Namun berubah rentan ketika salah satu unit kerja tak mampu berjalan semestinya dan menghambat kelanjutan sub kerja lain. Sebagai contoh misalnya, ada seorang akademisi yang hanya berkulat dengan riset kampus pasti membutuhkan seorang pedagang sayur keliling di sekitar komplek perumahan dia tinggal untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, yaitu makanan. Tukang sayur keliling inipun punya ketergantungan kepada pengepul sayuran, pembuat tahu dan tempe, pembuat roti goreng, dan banyak lagi agar barang dagangan yang dijual menjadi beragam. Pun begitu dengan pengepul sayuran dan pembuat tahu-tempe yang bergantung pada hasil kerja petani yang menanam aneka sayuran dan kedelai. Petani ini juga sangat bergantung pada pabrik budidaya bibit sayuran dan kedelai, serta pupuk hingga desinfektan yang berkualitas baik guna mendukung hasil pertaniannya, yaitu ketika panen sayuran dan/atau kedelai, hasilnya melimpah dan dapat memberinya hidup, dan seterusnya. Serial depedensi kompleks ini hanya mungkin berlanjut dengan syarat tidak ada salah satu aktor kerja tersebut absen. Karena baik dosen, tukang sayur keliling, petani, hingga pabrik saling menggantungkan hidup satu sama lain.

Tulisan ini berupaya menganalisis dampak *Covid-19* yang

melanda Indonesia melalui dua sudut pandang yaitu ideologi ekonomi dan Pancasila. Ideologi ekonomi dipakai untuk menyingkap metakonsepsi apa yang menjadi dasar penyelenggaraan perekonomian di Indonesia, sedangkan Pancasila digunakan sebagai kaca mata refleksi penting tentang usaha untuk mencapai cita-cita ekonomi yang semestinya. Dua sudut pandang ini nantinya akan memberi gambaran dan refleksi terhadap kondisi ekonomi pada saat pandemi *Covid-19* seperti sekarang, yang penulis sebut dengan (*pand*)-*economics*.

METODE

Sesuai dengan dua sudut pandang tersebut, metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah studi kepustakaan dan verifikasi media (*press*). Studi kepustakaan adalah upaya untuk menggali sumber-sumber informasi yang perlu melalui beragam teori, untuk diformulasikan ke dalam substansi nilai baik dalam hal sosial, budaya, politik dan lainnya. Selain itu, penelaahan teori ini juga dimaksudkan untuk memperkaya khasanah keilmuan sekaligus penelusuran jejak-jejak pemikiran yang berkaitan dengan objek kajian. Sehingga, hasil kajiannya dapat dipakai sebagai objek kritis terhadap kondisi yang sedang terjadi maupun refleksi masa depan yang akan datang.

Kemudian, verifikasi media merupakan cara untuk mempertegas citra realita yang menjadi objek kajian melalui penelusuran berita tentang sesuatu. Hal ini ditujukan agar ada pembandingan ataupun penegasan bahwa objek yang sedang diteliti memiliki bukti

atau jejak digital yang memiliki relasi sedemikian rupa sehingga upaya penelusuran ulang terhadap suatu berita atau kejadian dapat dilakukan dan dipertanggungjawabkan.

PEMBAHASAN

Perilaku Irasional dan Ideologi Ekonomi Kita

Beberapa waktu lalu, tanggal 10 Mei 2020, media nasional heboh dengan perilaku kaum menengah kota Jakarta yang berkerumun di depan *Sarinah Mall* guna memberi salam perpisahan pada sebuah restoran cepat saji pertama di Indonesia (*lih.* <https://tirto.id/lebay-perpisahan-mcd-sarinah-dan-lemahnya-pene-rapan-psbb-jakarta-fqpf>, akses 18 Mei 2020. *Bdk.* <https://news.detik.com/berita/d-5011193/warga-berkerumun-di-penutupan-mcd-sarinah-idi-min-ta-dki-tegas>, akses 18 Mei 2020). Di tengah kondisi pandemi *Covid-19* dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sedang diberlakukan di Jakarta, perilaku semacam ini tentu irasional. Selain alasan kesehatan, faktor sejarah juga tidak merekam jejak memori kolektif yang kuat antara warga dengan restoran tersebut. Jikapun ada hanyalah kenangan personal dari individu yang tak berdampak sistemik. Namun, fenomena yang terjadi seolah menegaskan betapa akrabnya hubungan antara konsumen dan perusahaan makanan cepat saji tersebut.

Fenomena ganjil tersebut merupakan cermin dari gerakan ekonomi politik. Deliarnov (2006: 149) yang memakai pisau analisis Mancur Olson menjelaskan bahwa “bentuk masyarakat di negara demokratis tidak sepenuhnya

mau bekerjasama secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama. Sebab untuk ikut bergabung dan melakukan tindakan kolektif, risiko yang ditanggung tetap bersifat individual. Sedangkan hasilnya yang berupa keuntungan dapat dinikmati oleh semua orang, tak peduli apakah mereka aktif ikut ambil bagian dalam tindakan kolektif tersebut atau tidak”. Dalam hal ini, tindakan irasional kaum menengah di Jakarta tadi adalah bentuk negasi dari kerjasama antar anggota masyarakat untuk patuh terhadap aturan, yaitu aturan PSBB. Ketidak-patuhan aturan bukanlah faktor tunggal mengapa perilaku tersebut dapat terjadi. Terlepas dari kurangnya akal maupun sikap abai yang dilakukan, faktor paling berpengaruh adalah pilihan psikologis warga sebagai tujuan. Perilaku tersebut sangat mungkin dilakukan secara sengaja untuk menegaskan status sosial suatu kelompok. Alasannya jelas, hanya mereka yang surplus pendapatannya yang sering mampir ke restoran cepat saji tersebut. Artinya, ada relasi ekonomi yang telah terbentuk untuk mengaskan status sosial seseorang.

Peristiwa tersebut setidaknya memberi dua analogi teoritis tentang realita perekonomian di Indonesia. *Pertama*, ideologi ekonomi modal (kapitalisme) telah berhasil secara intim menghegemoni pasar yang terbentuk hingga menyentuh aspek psikologi sosial, sehingga mampu menciptakan perilaku irasional sebagai bentuk kesetiaan konsumen terhadap perusahaan. Hadirnya kerumunan warga yang suka rela di hari penutupan restoran cepat saji ini adalah bukti yang cukup tentang keberhasilan perusahaan mencetak kon-

sumen ideologis yang solid (<https://money.kompas.com/read/2020/05/15/150411826/conversation-marketing-ala-mcdonalds-sarinah?page=all>, dan <https://kumparan.com/kumparannews/teka-teki-menelusuri-penggerak-massa-ke-mcd-sarinah-1tOT71gKzDj>, akses 18 Mei 2020). *Kedua*, ideologi ekonomi Indonesia kalah bersaing dengan sistem ekonomi internasional. Dengan logika peristiwa sejenis, dapat dianalogikan bahwa “tak ada konsumen yang merasa kehilangan ketika *Warteg* (Warung Tegal) atau *Burjo* (Warung Bubur Kacang Hijau) langganannya tutup selamanya, dan tak ada satupun berita yang *viral* membahasanya”. Padahal aspek sosial yang disumbangkan oleh warung-warung tersebut sangat signifikan dan bahkan surplus moral, karena meletakkan pondasi kemanusiaan di atas keuntungan ekonomi. Tidak sedikit para pemilik *warteg* atau *burjo* tadi tetap memberi pelayanan, meskipun konsumen menunda pembayarannya alias hutang.

Kekalahan sistem ekonomi *ala* Indonesia ini adalah akibat panjang dari terlambatnya pembaruan dan peningkatan (*to renewable and upgrading system*) model ekonomi dalam menghadapi pasar terbuka (*open market system*) yang menjadi arena pertarungan antar sistem ekonomi internasional dengan segala agenda ideologis di belakangnya seperti yang gencar dibahas di awal tahun 2010-an lalu yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Selain itu, mental feodal yang masih melekat pada jatidiri warga yang sengaja dipelihara dan terus menggejala pada hampir semua aspek kehidupan ikut membuat sistem ekonomi

Indonesia tak beranjak dan justru jatuh menghamba pada model-model ekonomi dunia. Hal ini sangat paradoks karena keterbukaan pasar dan “kecanggihan teknologi justru memfasilitasi kaum feodal untuk semakin mencengkeramkan kekuasaannya, bahkan semakin mudah dalam menentukan arah dan kebijakan politik” (Surya, 2018).

Sejak awal berdiri, Indonesia memang bukan negara dengan ideologi ekonomi yang berdikari. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, langkah strategis pertama yang dilakukan adalah nasionalisasi aset negara secara besar-besaran. “Nasionalisasi mengacu pada penghapusan pengawasan Belanda dan reorientasi ekonomi secara mendasar. Istilah nasionalisasi juga dapat dimaknai menggantikan pegawai-pegawai berkebangsaan Belanda dengan para manajer berkebangsaan Indonesia dalam birokrasi dan perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia selama berlangsungnya nasionalisasi aset bisnis Belanda” (Wasino, 2016: 65). Nasionalisasi tepat disebut sebagai langkah awal nasionalisasi ekonomi, namun bukan upaya untuk menciptakan sistem nasional yang mapan guna menggerakkan ekonomi. Nasionalisasi aset merupakan gerakan politik yang bermaksud mengubah kepemilikan dan pola-pola ekonomi dari sistem kolonial menjadi sistem ekonomi republik. Atau secara kasar dapat dikatakan sebagai upaya mengganti identitas kepemilikan aset dari Hindia Belanda menjadi kepemilikan Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk ideologi yang menjadi dasar pelaksanaan ekonomi yang hanya berganti nama. Pada

praktiknya, sistem ekonomi yang berlaku tetap menggunakan model kolonial. Sebagai peraturan pelaksanaannya pada tahun 1959 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1959 tentang pokok-pokok pelaksanaan UU No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda (Wardodjo, 2018: 101).

Pada tahun 1950-an, sistem ekonomi Indonesia belum beranjak dan belum memiliki bentuk yang jelas atau nir konsep. Musyadat (2003: 49) menjelaskan bahwa “konsep ekonomi di Indonesia masih mengalami kebimbangan karena sejarah panjang perlawanan Indonesia terhadap penghisapan dari sistem kapitalisme yang berakibat pada model ekonomi kapitalisme yang dibawa oleh Belanda ke Indonesia tak mampu tumbuh sempurna”. Hal ini dikarenakan sistem kapitalisme yang mestinya dikendalikan sepenuhnya oleh pusat kekuasaan, yaitu kaum kolonial Belanda, harus berkolaborasi dan mem-bagi kuasanya dengan penguasa lokal feodal, yaitu raja-raja lokal atau kaum priyayi. Karena itulah kapitalisme di Indonesia mengalami mutasi ideologi. Mutasi ideologi ini terjadi akibat dari perumusan model produksi yang baru, dengan jalan melumerkan dua model produksi dari model kapitalisme asli yang dinamis dan dikendalikan oleh pusat *ala* Belanda dengan model produksi statis yang dilanggengkan oleh kaum feodal nusantara melalui perdagangan.

Implikasi yang timbul kemudian ialah pertukaran barang yang tidak seimbang antara pusat dengan daerah. Hasil produksi daerah sering tak terserap

pasar, karena secara kualitas barang yang dihasilkan tertinggal jauh dari produksi pusat. Sistem produksi yang statis dan kurang efisien mengakibatkan kualitas barang yang dihasilkan juga tidak variatif. Apalagi jenis barang yang beredar di pasar didominasi oleh hasil produksi pusat. Selain itu, barang hasil produksi daerah seringkali sejenis dan sama dengan daerah lainnya. Ini menyebabkan ketersediaan barang menjadi melimpah dan secara spontan menurunkan harga barang. Pola kompetisi dagang yang seharusnya “pusat vs daerah” justru tidak terjadi dan berubah menjadi persaingan “daerah vs daerah”. Dengan kata lain, daerah tak mampu bersaing dengan pusat karena sistem ekonominya yang statis menyebabkan variasi hasil produksi terbatas dan tak bertumbuh. Berbeda dengan pusat yang berhasil mendominasi pasar dan mendikte kebutuhan barang di daerah karena jenis barang yang dihasilkan beragam dengan kualitas yang lebih baik. Akibatnya, kondisi ekonomi daerah mengalami depresi dan secara bertahap bermetamorfosis menjadi perpanjangan tangan pusat yang tunduk sebagai wilayah konsumtif. Sistem penaklukan ini sering disebut dengan model kapitalisme perifer, dan ini masih terjadi sampai sekarang.

Sistem ekonomi kapitalisme perifer punya efek samping yang masif. Karena faktor produksi yang dimiliki masing-masing daerah sangat terbatas, mau tidak mau pemenuhan kebutuhan daerah didikte dan menjadi agenda pusat. Sebagai contoh, revolusi hijau di era Soeharto dengan *tagline* “swasembada pangan” yang justru men-

ciptakan ketergantungan warga daerah terhadap pasokan beras dari pusat (<https://www.qureta.com/post/dampak-revolusi-hijau-dan-swasembada-pangan-orde-baru>, akses 19 Mei 2020). Pada-hal tidak semua daerah memiliki luas persawahan subur nan produktif, dan petani yang cukup ulet. Sehingga, tidak ada jaminan bahwa hasil panen padi pasti berlimpah dan dapat menjadi *lumbung* beras yang mampu menyuplai beras ke seluruh provinsi di Indonesia setiap tahun. Kondisi semacam ini justru membuka peluang terjadinya kelangkaan beras di daerah yang secara berangsur-angsur memaksa pusat untuk mengambil kebijakan impor beras pada negara lain, karena sentra produksi beras tak memenuhi target. Semestinya kata *swasembada pangan* tidak diartikan sebagai *swasembada* beras, melainkan *swasembada* karbohidrat. Maksudnya, daerah harus diberi kemerdekaan dalam menentukan produksi apa yang sesuai kebutuhan makanan pokok war-ganya, bukan mengikuti pusat dengan menyamaratakan kebutuhan pokok di setiap daerah adalah beras. Sehingga, kebutuhan pokok daerah dapat dipenuhi secara mandiri dan tidak bergantung dari *supply* barang pusat.

Sistem Ekonomi Keynesian

Di era sekarang, model-model ketergantungan semacam ini terus diciptakan dan ditransformasi secara baru dalam bentuk kebutuhan palsu melalui perantara iklan produk tertentu. Media dari berbagai *platform* telah secara fasih menciptakan kepatuhan konsumen dalam menentukan pemilihan konsumsi suatu barang, yang tanpa disadari juga

ikut melembagakan ideologi ekonomi. Pada titik ini, negara justru turut serta memfabrikasi cara kerja media semacam ini sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui kebijakan strategis nasional seperti proyek infrastruktur (*lih.* <https://www.pu.go.id/berita/view/3435/pemerintah-keluarkan-paket-kebijakan-infrastruktur>, akses 19 Mei 2020).

Jika menggunakan kacamata John Maynard Keynes (1883–1946), langkah kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah dengan mengedepankan proyek infrastruktur adalah benar. Keynes (2013) dalam bukunya *The General Theory of Employment, Interest, and Money* yang terbit pertama kali di tahun 1936 menjelaskan bahwa “pengeluaran pemerintah merupakan faktor penting yang mendorong agregat permintaan. Itu berarti peningkatan pengeluaran yang dilakukan pemerintah akan berdampak setara secara makro ekonomi dengan meningkatnya pendapatan”. Pengeluaran yang dimaksud adalah investasi pemerintah pada beberapa sektor strategis seperti jalan raya, rel kereta api, bandara, rumah sakit, dan sekolah dengan harapan terjadi peningkatan aktivitas kerja, konsumsi domestik dan agregat permintaan pada sektor ekonomi (Muzhani, 2017: 282). Artinya aktivitas belanja pemerintah harus dibaca sebagai stimulus percepatan dan penggandaan sirkulasi ekonomi dari produksi, distribusi dan konsumsi dalam waktu yang relatif pendek, dengan harapan dapat menaikkan pendapatan negara. Tetapi kemunculan *Covid-19* mengoreksi itu semua.

Sistem ekonomi yang dicetuskan oleh Keynes sebenarnya secara implisit mensyaratkan dua hal pokok, yaitu *trust* warga kepada pemerintah yang kuat dan kalkulasi anggaran yang matang. Kepercayaan warga kepada pemerintah hanya bisa terjadi ketika pengeluaran yang dilakukan pemerintah benar-benar terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, pengeluaran negara tersebut harus mampu menciptakan iklim ekonomi yang baik sekaligus dapat dinikmati secara langsung dan luas oleh warga, karena menyangkut pemulihan pendapatan pasca aktivitas mega belanja maupun pinjaman utang dari negara lain. Bila tidak dilakukan secara hati-hati, inflasi nasional akan memukul pemasukan negara dan berakibat cukup fatal pada defisitnya anggaran serta dibarengi dengan resesi ekonomi yang berujung pada krisis nasional.

Berkaca pada kondisi Indonesia saat ini, maka dua prasyarat tadi tidak terpenuhi. *Trust* rakyat terhadap pemerintah cukup lemah karena tidak dibangun secara solid akibat segregasi politik pasca pemilu yang membelah warga menjadi dua kubu dimana residu api konfliknya tak kunjung padam. Kemudian, ketahanan ekonomi warga mayoritas masih berada pada posisi rentan ketika menghadapi gejolak atau operubahan ekonomi. Belum tuntasnya kebutuhan dasar yaitu *sandang, pangan, dan papan* dari warga selalu menjadi alasan utamanya. Kerentanan ini membuat gerak ekonomi makro tak mungkin tercapai karena konsumsi di kalangan warga sangat terbatas, sehingga sangat riskan ketika berhadapan perubahan

harga hingga perubahan konstelasi sosial-politik. Bahkan ada *anecdote*, “bila harga cabe di pasar Godanglegi di Kediri naik, maka Bursa Efek Jakarta akan mengalami inflasi” (*bdk*. <https://katadata.co.id/berita/2019/12/02/pedasnya-harga-cabai-yang-kerap-membuat-gejolak-inflasi>, akses 18 Mei 2020). Apalagi kondisi pandemi *Covid-19* yang melanda memaksa pemerintah untuk merelokasi anggaran dari agenda investasi strategis menjadi agenda penanggulangan pandemi. Kalkulasi keuntungan ekonomi yang semestinya diperoleh pun meleset dari target.

Sebelum wabah *Covid-19* mulai merebak di Indonesia, proyek besar infrastruktur nasional sebenarnya telah mengalami depresi. Pembangunan infrastruktur ini tidak menghasilkan *multipplier effect* yang signifikan bagi pendapatan pemerintah dan justru menimbulkan kelesuan ekonomi. Pada akhirnya banyak proyek infrastruktur seperti jalan tol ditawarkan kembali kepada swasta untuk menambal pembayaran hutang pembangunannya (<https://tirto.id/polemik-bangun-jalan-tol-pakai-dana-utang-lalu-dijual-ke-swasta-ddWl>; *bdk*.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20191030174429-4-111463/di-periode-kedua-jokowi-bakal-banyak-tol-dilepas-ke-asing>; *bdk*, <https://economy.okezone.com/read/2019/11/21/320/2132635/4-proyek-jalan-tol-rp113-triliun-ditawarkan-ke-swasta-ini-daftarnya>, diakses 19 Mei 2020). Selain itu, pemerintah juga mengupayakan pendapatan baru dengan mengoptimalkan pendapatan di luar pajak, termasuk menaikkan iuran BPJS

di tengah pandemi ini (Tirto.id, Mei 2020; theconversation.id, November 2019).

Pada aspek industri, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara masal yang dilakukan oleh sebagai akibat resesi ekonomi di masa pandemi menjadi yang tak terelakan (<https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/19/081000465/total-19-juta-pekerja-di-phk-dan-dirumahkan-akibat-pandemi-virus-corona>, akses 20 Mei 2020). Menurunnya permintaan mengakibatkan intensitas produksi dipangkas demi menjaga kesehatan keuangan perusahaan. Hal ini terjadi karena pemerintah kurang tegas dalam menerbitkan kebijakan prioritas di tengah pandemi, yang membuat para pelaku usaha tak memiliki kepastian harus melakukan apa. Kerugian hingga kebangkrutan pun tak terhindarkan. Oleh karena itu, reorientasi ideologi ekonomi menjadi perlu.

***Pandeconomics* dan Sistem Ekonomi Pancasila**

Kemandirian ekonomi dari sub-sub kerja harus ditata ulang tanpa melepas relasi ekonomi yang telah terjalin kuat antara faktor produksi, distribusi dan konsumsi. Hal ini dimaksudkan untuk menghasilkan alternatif sistem ekonomi yang lebih mapan dan mampu bertahan di segala kondisi. Sistem ekonomi berdasar ideologi Pancasila telah sering menjadi wacana pembaharuan model. Akan tetapi secara konsep, model yang sesuai dengan kondisi di Indonesia belum juga terealisasi. Muhammad Hatta pernah menawarkan konsep ekonomi Pancasila yang dengan nama Demokrasi Ekonomi dengan ko-perasi sebagai

tulang punggungnya (*sokoguru*). Sedangkan menurut Soekarno, kemandirian ekonomi hanya bisa dicapai ketika ekonomi, politik dan budaya terintegrasi dalam satu tarikan nafas bernama *Trisakti*.

Model koperasi sebagai wujud sistem ekonomi Pancasila dalam sudut pandang Hatta adalah upaya untuk mendistribusikan keadilan. Pelaksanaan bagi hasil usaha adalah prinsip berkeadilan untuk meminimalisasi penguasaan individu terhadap sumber-sumber ekonomi melalui prinsip gotong-royong. Maksudnya tidak ada dominasi kepemilikan individu sehingga ada *sharing of benefit* yang mampu menghasilkan rasa adil. “Konsep koperasi merupakan bukti keprihatinan Hatta akan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia. Koperasi ditawarkan guna memperlihatkan semangat kolektivitas gotong-royong dan tolong menolong. Kedua spirit ini menjadi dasar dari budaya bangsa Indonesia” (Pohan dkk., 2018: 28). Selain itu, koperasi melahirkan kemandirian pada sektor kerja karena membentuk sub sistem yang solid meski dengan jaringan yang kecil dan terbatas.

Pada model *Trisakti* Soekarno, ekonomi harus dikontekskan pada kondisi politik dan budaya masyarakat. Artinya, ekonomi hanya akan mandiri ketika kondisi politik dan sosial-budaya suatu bangsa benar-benar terbebas dari campur tangan negara lain. Karena “Soekarno hanya mengakui kemakmuran, bila diraih dengan kerja dan keringat sendiri” (Surya, 2019: 107). Dengan kata lain, *political will* dari penguasa sangat menentukan bagaimana bentuk ekonomi yang ingin dicapai

secara ideal melalui *policy* yang adil dengan prinsip “semua buat semua”. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah mungkin sistem ekonomi Pancasila ini mampu bebas dari kekangan kapitalisme? Jika melihat realitas Indonesia hari ini, jelas tidak mungkin. Sistem kemandirian dengan model koperasi saat ini tidak mungkin bersifat mandiri, lebih-lebih menyangkut sektor ekonomi makro. Sistem koperasi harus mampu masuk ke dalam sistem yang telah ada dengan mendefinisikan sistem alternatif agar kelompok warga dengan kondisi ekono-mi rentan tidak menjadi korban. Pada titik inilah negara harus hadir dengan mengintervensi ekonomi kapital yang telah mapan melalui kebijakan yang melindungi sektor produksi warganya. Melalui nilai-nilai ke-koperasian yang tertuang di dalam kebijakan pemerintah, diharapkan sistem ekonomi yang berjalan kemudian menghasilkan jalin-kerjasama mutualisme bagi para pemilik modal besar dengan warga. Secara rill, kerjasama mutualisme ini dapat diwujudkan dengan menerbitkan aturan “bahwa setiap toko modern wajib berbadan hukum koperasi”. Model kebijakan ini telah secara fasih dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek Jawa Timur dimana toko swalayan modern yang mau didirikan dipaksa untuk mengurus ijin usaha yang berbadan hukum koperasi dan memberi kesempatan warga sekitar untuk diikutsertakan dalam mengembangkan toko tersebut, yaitu warga diizinkan untuk memajang barang produksi setempat di etalase toko setempat ([https://news.detik.com/berita-jawa-](https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3529134/di-treng-galek-toko-modern-wajib-berbadan-hukum-koperasi)

[timur/d-3529134/di-treng galek-toko-modern-wajib-berbadan-hukum-koperasi](https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3529134/di-treng-galek-toko-modern-wajib-berbadan-hukum-koperasi), akses 20 Mei 2020).

Dengan model kerjasama antara pemilik modal besar dan warga melalui sistem koperasi, pemerataan hasil dan keuntungan dapat didistribusikan secara berkeadilan. Dominasi individu ataupun kelompok dalam bentuk korporasi yang surplus modal berlimpah menjadi terbatas dan dibatasi, sehingga relasi kerja ekonomi yang dilakukan menjadi minim dari aspek penindasan. Semua ini mampu dilakukan jika sinergi antara pemerintah dengan kekuasaan politiknya mampu mendukung sistem ekonomi yang berkeadilan. Terlebih kondisi ekonomi di masa pandemi seperti saat ini atau bisa disebut dengan istilah *pandeeconomics*. Pada akhirnya negara yang tanpa ideologi ekonomi mandiri adalah negara yang tanpa tujuan. Sebab, amanat konstitusi Indonesia adalah mencapai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

KESIMPULAN

Pandemi *Covid-19* yang telah melanda di hampir semua negeri telah membuka alternatif cara berpikir dan sistem ekonomi yang bekerja di dalam sebuah negara, termasuk Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia yang dari awal berdiri belum berdikari dan belum memiliki struktur mapan justru secara bertahap menciptakan ketergantungan antara pusat dengan daerah. Karena sistem ekonomi tidak dibangun dengan pondasi kemandirian yang tegak, terlebih sistem ekonomi kapitalisme perifer sebagai bentuk perkawinan antara kapitalisme kolonial dengan struktur

feodal di daerah, telah berhasil memposisikan daerah hanya sebagai agen atau perpanjangan tangan dari kekuasaan pusat.

Guna menormalisasi kondisi, alternatif model ekonomi di Indonesia semestinya kembali pada konsep ekonomi nasional. Ekonomi nasional yang dimaksud bukan sekadar semangat untuk menasionalisasi seluruh aset atau perusahaan yang dulu dimiliki oleh kaum kolonialis Belanda menjadi milik NKRI, tetapi merencanakan sistem dan melaksanakannya. Hatta dan Soekarno memiliki terjemahan tentang sistem ekonomi yang dimaksudkan. Hatta menyebutnya dengan demokrasi ekonomi yang berwujud koperasi, sedangkan Soekarno berupaya mengawinkan antara ekonomi, politik dan budaya dalam satu kerangka berpikir *Trisakti*. Dua konsep ini berupaya untuk mewujudkan keadilan sosial agar tidak terjadi segmentasi kelas sosial yang tidak adil, karena perbedaan kepemilikan modal. Sebenarnya ide dua tokoh besar ini telah terwujud di daerah dengan adanya aturan yang berlaku di Kabupaten Trenggalek Jawa Timur, dimana setiap pengusaha toko swalayan modern yang ingin berdiri di wilayahnya wajib berbadan hukum koperasi. Tata kelolanya pun mewajibkan pada penguasa untuk berkolaborasi dengan warga sekitar agar terjadi pemerataan distribusi supaya barang yang dipajang dan dijual pada etalase-etalase toko juga merupakan hasil produksi warga. Sehingga, warga juga memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan.

Kondisi ekonomi seperti ini memberi refleksi yang cukup relevan

bahwa “ekonomi tak mungkin berbohong, tapi para ekonom sering, lalu, bagaimana dengan Menteri Ekonomi?”.

DAFTAR RUJUKAN

- Deliarnov, 2006. *Ekonomi Politik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Desismansyah Eka Putra, Surya. 2018. *Feodalisme 4.0*. dalam *Seri Studi Kebudayaan II, Indonesia Sebagai Ruang Imajinasi*. Malang: Program Studi Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya.
- Desismansyah Eka Putra, Surya. 2019. *Autarkeia Pendidikan Demokrasi Di Indonesia*. Jurnal Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdid, Volume 2 Nomor 2, November 2019. E-ISSN 2685-466X, P-ISSN 1410-2617, hlm. 104-116.
- Galbraith, J.K. 1983. *Tuntutan-Tuntutan Teknologi*. Dalam Bunga Rampai “*Teknologi dan Dampak Kebudayaannya, Volume I*”. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Keynes, John Maynard. 2013. *The General Theory Of Employment, Interest And Money, Volume VII*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Musyaddad, A. 2003. *Kapitalisme Indonesia: Langkah-Langkah Tanpa Peta*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Volume 7, Nomor 1, Juli 2003, ISSN 1410-4949, hlm. 35-62.
- Muzhani, Marin. 2017. *Fixed or Flexible Exchange Rates? History and Perspectives*. Malaga: Vernon Press.

- Pohan, Ibnu Asqori. Krisdayanti, Aylia Eka. & Simanjuntak, Dakka Bangun. 2018. *Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta*. Jurnal JIPP, Vol. 4, No. 1, November 2018, hlm. 21-31.
- Wardodjo, Waskito Widi. 2018. *Ekonomi Indonesia 1950-an dan Penguasaan Negara terhadap Perusahaan Kereta Api Pasca-KMB 1949*. Jurnal Indonesian Historical Studies, Vol. 2, No. 2, Tahun 2018, hlm. 96-106.
- Wasino. 2016. *Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Asing Menuju Ekonomi Berdikari*. Jurnal Paramita Vol. 26, No. 1, Tahun 2016, ISSN: 0854-0039, E-ISSN: 2407-5825, hlm. 62-71.
- Online**
- <https://tirto.id/lebay-perpisahan-mcd-sarinah-dan-lemahnya-penerapan-psbb-jakarta-fqpf>, akses 18 Mei 2020.
- <https://news.detik.com/berita/d-5011193/warga-berkerumun-di-penutupan-mcd-sarinah-idi-minta-dki-tegas>, akses 18 Mei 2020.
- <https://money.kompas.com/read/2020/05/15/150411826/conversation-marketing-ala-mcdonalds-sarinah?page=all>, akses 18 Mei 2020.
- <https://kumparan.com/kumparannews/teka-teki-menelusuri-penggerak-massa-ke-mcd-sarinah-1tOT71gKzDj>, akses 18 Mei 2020.
- <https://katadata.co.id/berita/2019/12/02/pedasnya-harga-cabai-yang-kerap-membuat-gejolak-inflasi>, akses 18 Mei 2020.
- <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/19/081000465/total-19-juta-pekerja-di-phk-dan-dirumahkan-akibat-pandemi-virus-corona>, akses 20 Mei 2020.
- <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3529134/di-trenggalek-toko-modern-wajib-berbadan-hukum-koperasi>, akses 20 Mei 2020.
- <https://www.quareta.com/post/dampak-revolusi-hijau-dan-swasembada-pangan-orde-baru>, akses 19 Mei 2020.
- <https://www.pu.go.id/berita/view/3435/pemerintah-keluarkan-paket-kebijakan-infrastruktur>, akses 19 Mei 2020.
- <https://tirto.id/polemik-bangun-jalan-tol-pakai-dana-utang-lalu-dijual-ke-swasta-ddWI>, akses 19 Mei 2020.
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191030174429-4-111463/di-periode-kedua-jokowibakal-banyak-tol-dilepas-ke-asing>, akses 19 Mei 2020.
- <https://economy.okezone.com/read/2019/11/21/320/2132635/4-proyek-jalan-tol-rp113-triliun-ditawarkan-ke-swasta-ini-daftarnya>, akses 19 Mei 2020.
- <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/19/081000465/total-19-juta-pekerja-di-phk-dan-dirumahkan-akibat-pandemi-virus-corona>, akses 20 Mei 2020.
- [<http://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/pinus>](https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3529134/di-trenggalek-</p></div><div data-bbox=)

toko-modern-wajib-berbadan-
hukum-koperasi, akses 20 Mei 2020.